



Sejarah Pengeboman Candi Borobudur Tahun 1985: Tinjauan Sejarah Sosial Politik di Indonesia

Angga Novian Pratama [✉], Ibnu Sodiq, dan Andy Suryadi

Jurusan Sejarah Universitas Negeri Semarang, Semarang-Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima September 2019

Disetujui Desember 2019

Dipublikasikan Desember 2019

Keywords:

Bombing, Borobudur Temple, Social History.

Abstrak

Sejarah Perpolitikan di Indonesia khususnya Orde Baru memang tidak terlepas dari konflik antara Islam dan negara terutama masalah ideologi. Hal tersebut terlihat ketika pemerintahan Orde Baru menerapkan strategi politik yang tidak aspiratif terhadap Islam, salah satunya asas tunggal Pancasila. Ketidakaksamaan pandangan politik dengan pemerintah menimbulkan berbagai reaksi dan perlawanan dari kalangan Islam radikal. Salah-satunya peristiwa pengeboman Candi Borobudur tahun 1985. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yaitu (1) Heuristik, (2) Kritik Sumber, (3) Interpretasi, dan (4) Historiografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa pengeboman Candi Borobudur, yaitu (1) Faktor politik, yang mana pengeboman tersebut merupakan bentuk reaksi dari berbagai kebijakan Orde Baru yang dianggap meminggirkan Islam, (2) Faktor sosial, munculnya rasa ketidakadilan yang dilakukan pemerintah dalam tragedi Tanjung Priok 1984, (3) Faktor emosi keagamaan dan ideologi, yaitu keinginan melakukan revolusi seperti di Iran dengan cara balas dendam melakukan aksi pengeboman. Penanganan pemerintah terhadap kasus ini membutuhkan waktu selama dua bulan, hingga terjadi peristiwa meledaknya Bus Pemudi Ekspres yang berujung penangkapan pelaku. Pengeboman ini mengakibatkan rusaknya sembilan stupa Candi Borobudur yang berujung pada pemugaran dan peningkatan sistem keamanan kawasan candi. Peristiwa ini juga berdampak pada bidang ekonomi pariwisata, sosial, dan politik di Indonesia.

Abstract

The history of politics in Indonesia, especially Orde Baru is indeed inseparable from the conflict between Islam and the state, especially the problem of ideology. This was seen when the Orde Baru applied a non-aspirational political strategy to Islam, one of them is asas tunggal Pancasila. The inequality of political views with the government caused various reactions and resistance from radical Islamists. One of the incidents is the Borobudur Temple bombing in 1985. The methods used in this study were historical research methods, this is: (1) Heuristics, (2) Source Criticism, (3) Interpretation, and (4) Historiography. The results of this study indicate that there are factors underlying the occurrence of the Borobudur Temple bombing, this is: (1) Political factors, the reactions of various Orde Baru policies which were considered to marginalize Islam, (2) Social factors, the emergence of a sense of injustice conducted by the government in the Tanjung Priok tragedy 1984, (3) Religious and ideological emotional factors, the desire to carry out a revolution like in Iran by revenge for bombing. The handling of the government in this case took two months, until the incident of Pemudi Express Bus exploded which resulted in the arrest of the perpetrators. This bombing resulted in the destruction of nine Borobudur Temple stupas which led to the restoration and improvement of the temple area security system. This incident also had an impact on the tourism, social and political economy in Indonesia.

© 2019 Universitas Negeri Semarang

[✉] Alamat korespondensi:

Ruang Jurnal Sejarah, Gedung C5 Lantai 1 FIS Unnes

Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

E-mail: anganovian24@gmail.com

ISSN 2252-6633

PENDAHULUAN

Sejarah Perpolitikan di Indonesia khususnya Orde Baru memang tidak terlepas dari konflik antara Islam dan negara terutama masalah ideologi. Ketidaksamaan pandangan politik dengan pemerintah menimbulkan berbagai reaksi dari umat Islam. Salah satunya adalah radikalisme agama yang dilakukan oleh gerakan Islam garis keras. Gerakan ini telah muncul pada masa kemerdekaan Indonesia, bahkan dapat dikatakan sebagai akar gerakan Islam garis keras era Orde Baru dan reformasi. Gerakan dimaksud adalah Darul Islam (DI) atau Negara Islam Indonesia (NII). DI adalah sebutan terhadap pemberontakan kelompok Islamis pada 1950-an yang basis perlawanannya terutama di Jawa Barat. Gerakan ini kemudian menyebar ke beberapa daerah seperti Aceh dan Sulawesi Selatan dengan tokoh utamanya Sekarmadjji Maridjan Kartosoewirjo. Gerakan ini berhasil ditaklukkan oleh pemerintah Indonesia pada 1962. (Solahudin, 2011: 2).

Pada dasarnya perkembangan yang berlangsung di dalam gerakan-gerakan keagamaan radikal semakin kompleks. Seiring dengan berjalannya waktu maka dinamika gerakan Islam radikal juga semakin bervariasi. Terdapat berbagai gerakan sempalan yang memiliki karakteristik pemikiran dan orientasi gerakan yang berbeda-beda. Selain basis sosialnya juga beragam, mulai yang berkembang di tengah masyarakat umum sampai yang tumbuh di lingkungan kaum terpelajar, terutama di perguruan tinggi (Mubarak, 2008:71).

Pada tahun 1976-1981-an, terjadilah berbagai aksi teror yang dilakukan gerakan Islam radikal yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Periode ini dikenal dengan sebutan Periode Komando Jihad. Tujuan kelompok ini adalah membentuk "Dewan Revolusi Islam Indonesia", menentang Pancasila dan UUD 1945 dan berkeinginan untuk membentuk Negara Islam Indonesia. Selain Komando Jihad, kelompok lain yang dianggap ekstrim adalah teror Warman yang melakukan 16 aksi perampukan dan pembunuhan. Kelompok yang lainnya adalah Kelompok Imran yang pernah menyerang Pos Polisi Pasir Kaliki, Cicedo,

Bandung dan pembajakan pesawat Garuda, DC-9, Wolya (Tim LIPI, 2001:110).

Perlawanan terhadap Soeharto muncul ketika pemerintah Orde Baru mengeluarkan berbagai kebijakan yang dianggap anti-Islam seperti masuknya Aliran Kepercayaan ke dalam GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara), dan rencana penetapan Pancasila sebagai asas tunggal bagi partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Gagasan untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini dilontarkan Presiden Soeharto dalam pidatonya diberbagai acara ataupun kegiatan-kegiatan kenegaraan. Kelompok Islam oposisi terus melanjutkan perlawanan terhadap rezim Orde Baru yang akan membuat Undang-Undang (UU) yang memaksakan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi partai politik dan organisasi masyarakat. Kekacauan politik terjadi pada paruh terakhir 1984. Puncaknya, terjadi insiden Tanjung Priok dimana umat Islam yang anti-asas tunggal ditembaki tentara. Perlawanan ini berujung pada pemberontakan antara aparat keamanan dengan massa anti-asas tunggal daerah Tanjung Priok yang memakan korban ratusan jiwa. Namun, pada pengumuman yang dilakukan pemerintah pasca tragedi Tanjung Priok ini menjadi kontroversial.

Upaya pemerintah menutup-nutupi insiden berdarah ini bukannya meredakan kemarahan orang, malahan makin menyulut kemarahan dan kebencian para aktifis muslim kepada pemerintah. Beberapa pekan setelah tragedi berdarah Tanjung Priok tepatnya awal Oktober 1984, tiga bom meledak dikawasan bisnis yang didominasi etnis Cina di Jakarta, yang merusak dua bank BCA (Bank Central Asia) milik liem Sioe Liong, salah seorang sekutu bisnis Soeharto yang terkaya dan paling dipercaya. Belakangan aparat bisa membongkar bahwa pelaku pengeboman adalah para aktivis GPK (Gerakan Pemuda Kabah) (Solahudin, 2011: 186).

Kemarahan serupa dirasakan oleh para aktivis Ikhwanur muslimin. Apalagi mereka mendengar isu bahwa tragedi Tanjung Priok didesain oleh Pak Harto untuk memancing

kemarahan warga muslim untuk berbuat anarkis, sehingga ada alasan untuk membantainya. Mereka juga mendengar isu bahwa tragedi ini adalah bagian dari proyek besar kristenisasi dan mayoritas tentara-tentara yang menembak warga Priok adalah tentara Kristen yang dipimpin oleh jenderal Benny Moerdani (Solahudin, 2011: 186). Aksi kekerasan aparat keamanan tragedi Tanjung Priok tersebut, dibalas oleh beberapa kelompok termasuk kelompok Syi'ah di Malang dengan berbagai aksi teror seperti pengeboman Candi Borobudur dan beberapa Gereja di Malang. Aksi ini dibalas lagi dengan aksi represif aparat keamanan. Para tokoh oposisi dari berbagai kelompok diciduk aparat keamanan (Solahudin, 2011: 5).

Kelompok Syi'ah tersebut bekerjasama dengan para aktivis kelompok pesantren kilat yang dipimpin oleh Mursalin Dahlal, seorang tokoh DI, untuk melakukan berbagai aksi teror sebagai aksi balas dendam. Mereka mengebom beberapa gereja dan Candi Borobudur. Sasaran terhadap gereja ini merupakan ekspresi kemarahan mereka terhadap orang Kristen, yang dianggap bersekutu dengan Soeharto menindas umat Islam (Solahudin, 2011: 160). Keberhasilan revolusi Iran telah menginspirasi kelompok ini. Pengeboman Candi Borobudur juga memiliki kaitan dengan pengeboman Gedung Seminari Alkitab Asia Tenggara (SAAT) dan Gereja Sasana Budaya Katolik di Malang yang meledak sebelumnya, serta meledaknya Bus Pemudi Express di Banyuwangi pada tanggal 16 Maret 1985.

Ada beberapa penelitian terdahulu seperti karya Solahudin (2011) dan M. Zaky Mubarak (2008) yang sama-sama membahas gerakan Islam radikal pada masa Orde Baru hingga reformasi. Akan tetapi dalam buku-buku tersebut tidak dijelaskan secara rinci mengenai peristiwa Pengeboman Candi Borobudur. Penelitian mengenai sejarah gerakan Islam radikal di Indonesia khususnya masa Orde Baru tergolong masih sedikit dan penting untuk dipelajari. Peristiwa pengeboman Candi Borobudur sangat menarik untuk dikaji, apalagi memiliki kaitan dengan dinamika sosial politik Indonesia pada masa itu. Penanganan pemerintah dan dampak

yang ditimbulkan pengeboman ini juga sangat menarik untuk dibahas. Maka atas dasar itu, penulis tertarik untuk mengangkat tema ini untuk dijadikan penelitian.

METODE

Metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah. Terdapat empat langkah dalam prosedur penelitian sejarah yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi atau penulisan sejarah (Gottschlak, 1986:32). (a) Heuristik, dalam hal ini penulis menggunakan dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer penulis menggunakan sumber dokumen yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Malang dan Kejaksaan Negeri Malang berupa arsip Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pelaku dan saksi pengeboman Candi Borobudur serta putusan pengadilan pelaku pengeboman. Selain itu, penulis juga menggunakan arsip yang diperoleh dari Balai Konservasi Borobudur dan berita se-zaman yang diterbitkan oleh surat kabar Kompas, Suara Merdeka, Jawa Pos, dan Majalah Tempo.

Penulis juga melakukan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan. Sumber sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu buku-buku, artikel, dan jurnal berkaitan dengan pengeboman Candi Borobudur dan gerakan-gerakan Islam radikal di Indonesia yang diperoleh dalam studi pustaka yang telah dilakukan; (b) Kritik Sumber, Dalam penelitian ini semua sumber dipilih melalui kritik ekstern dan intern, sehingga diperoleh fakta-fakta yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Kritik ekstern dilakukan peneliti dengan melihat tanggal dan tahun yang dicantumkan, kertas, stempel yang digunakan dalam data maupun dokumen yang didapatkan. Kemudian dalam kritik intern penulis melakukan penilaian dengan membandingkan isi atau informasi yang terdapat di dalam sumber primer dengan hasil wawancara dengan narasumber; (c) Interpretasi, pada tahap ini data yang diperoleh diseleksi, dimana penulis menentukan data mana yang harus ditinggalkan dalam penulisan sejarah dan dipilih mana yang relevan. Fakta-fakta sejarah yang telah melalui tahap kritik sumber

dihubungkan atau saling dikaitkan sehingga pada akhirnya akan menjadi suatu rangkaian yang bermakna; (d) Historiografi, adalah rekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses (Gottschlak, 1986:32). Historiografi, tahap ini adalah tahap akhir dari kegiatan penelitian sejarah. Di sini peneliti menyajikan hasil penelitian dalam bentuk cerita sejarah dengan penggambaran yang jelas dari hasil yang diperoleh selama melakukan penelitian tentang pengeboman Candi Borobudur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Politik Islam Pada Masa Orde Baru

Belajar dari pengalaman Orde lama yang lebih menekankan kepada politik sebagai kegiatan kenegaraan, Orde Baru lebih menekankan pada bidang ekonomi pembangunan yang pragmatis, nonsektarian, dan memberikan komitmen pada ideologi resmi negara "Pancasila" (Nugroho, 2003: 13). Adapun salah satu kebijakan politik penting pemerintahan Orde Baru ketika memulai memegang tampuk kekuasaan adalah dipilihnya modernisasi sebagai titik tolak dan kerangka kerangka landasan pembangunan bangsa (Anwar, 1995: 17). Mensukseskan kebijakan modernisasi pembangunan, pemerintahan memiliki elite rezim yang didominasi oleh mayoritas dari kalangan ABRI abangan, teknokrat sosialis dan Kristen (Karim, 1999: 118).

Posisi politik umat Islam setelah Orde Baru berkuasa tidak banyak mengalami perubahan yang signifikan. Seperti halnya yang dilakukan oleh rezim Orde lama, Orde Baru pun menerapkan strategi politik yang tidak aspiratif terhadap Islam, atau dengan kata lain menekan potensi politik umat Islam. Hal ini dilakukan untuk mempersempit kekuatan politik Islam yang dianggap sebagai ancaman terhadap kelangsungan rezim Orde Baru. Watson sesuai yang dikutip oleh M. Rusli Karim (1999: 119) menyebutkan tiga langkah yang diambil oleh Orde Baru sebagai strategi mengurangi pengaruh Islam di dalam politik. Pertama, menghancurkan pengaruh anggota politik Masyumi. Kedua, penyederhanaan struktur partai dengan menggabungkan partai-partai Islam ke dalam

satu partai saja. Ketiga, mendorong perkembangan institusi-institusi keagamaan melalui perbaikan departemen agama.

Perkembangan selanjutnya, rezim Orde Baru yang telah kuat kedudukannya mengeluarkan kebijakan baru untuk menyeragamkan ideologi negara. Pada tahun 1982, Presiden Soeharto mengeluarkan isu pergantian asas bagi partai politik dan organisasi kemasyarakatan (Ormas). Rencana pemerintah untuk menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal merupakan keinginan Presiden Soeharto dan didukung oleh hasil seminar II Angkatan Darat pada tanggal 2 April 1981 dan pidato-pidato kepresidenan antara lain tanggal 16 Agustus 1982 dan 01 Oktober 1982 (Feiliard, 2008: 213).

Kebijakan politik Orde Baru ini bukan tanpa reaksi biasa. Sejauh menyangkut umat Islam, paling tidak sejak tahun 1982, mereka telah menunjukkan reaksi terhadap usulan pemerintah mengenai Pancasila sebagai asas tunggal bagi semua ormas. Sejumlah ormas Islam keberatan terhadap gagasan pemerintah karena takut dengan menerima Pancasila sebagai asas tunggal berarti Pancasila akan menggantikan Islam, atau bahwa Pancasila akan disamakan dengan agama (Ismail, 1999: 230). Reaksi umat Islam terhadap asas tunggal Pancasila ini menimbulkan perbedaan serius. Bahkan, umat Islam telah mengalami konflik yang paling rumit dan menghabiskan masa paling lama dalam memperdebatkan pergantian asas ini. Dari pertengahan 1982 sampai 1985, perdebatan terjadi dan disertai oleh konflik internal dan konflik dengan pemerintah (Karim, 1999: 184).

Merespon kebijakan orde baru, kalangan Islam politik mengalami polarisasi menyikapinya, ada yang melakukan konfrontasi terhadap orde baru dan sementara yang lain, mengambil langkah adaptasi serta responsif dengan menafsirkan teologi Islam selaras dengan kebijakan modernisasi orde baru (Simorangkir, 2015: 205). Berbagai reaksi keras muncul dari gerakan Islam radikal atau fanatik menentang berbagai kebijakan Orde Baru tersebut. Akibat dari reaksi organisasi masyarakat (ormas) Islam, pemerintah menganggap bahwa gerakan-gerakan ini adalah penolakan terhadap ideologi Pancasila

dan membahayakan bagi persatuan negara. Salah satu bentuk dari aksi reaksi antara pemerintah dengan ormas-ormas Islam mengenai kebijakan pemerintah ini adalah meledaknya peristiwa Tanjung Priok 1982. Peristiwa Tanjung Priok terjadi pada tanggal 12 September 1984. Peristiwa ini merupakan peristiwa berdarah yang memakan banyak korban. Peristiwa Tanjung Priok adalah wujud tindak kekerasan yang dilakukan pemerintah terhadap rakyatnya (Fatwa, 2006: vii). Tindakan pemerintah dalam peristiwa Priok 1984 direspon dan dikecam oleh kalangan Islam radikal.

Serangkaian penanganan yang diperlihatkan aparatus negara dengan pendekatan kekerasan terhadap kelompok-kelompok militan keagamaan ini menimbulkan beberapa implikasi dikalangan para eksponen gerakan Islam, khususnya mereka yang secara intensif terlibat kedalam gerakan-gerakan yang dapat diidentifikasi sebagai suatu aliran dengan kumpulan militan tersebut (Mubarak, 2008: 69). Pemerintah bertindak sangat represif dan sangat otoriter. Dengan sistem totaliter seperti ini semua aktifitas organisasi dikontrol dibawah pengawasan pemerintah sehingga tidak ada organisasi sosial politik yang diperbolehkan memakai asas selain Pancasila. Oleh karena itu siapa saja yang menentang kebijakan pemerintah maka akan dituduh dengan tuduhan melakukan tindakan subversive (Sodiq, 2010: 28).

Pasca meletusnya peristiwa Tanjung Priok, terjadi pengeboman Bank Central Asia dan pengeboman Candi Borobudur di Magelang. Pengeboman tersebut merupakan reaksi balas dendam terhadap terjadinya peristiwa Tanjung Priok. Munculnya gerakan Islam radikal masa Orde Baru merupakan sebuah reaksi terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru yang dirasa merugikan seperti difusi partai, deideologi, depolitisasi, dan pemberlakuan asas tunggal Pancasila. Selain itu, mulai munculnya gerakan Islam radikal pada masa Orde Baru merupakan bentuk frustasi dan tindakan alternatif lain karena upaya secara politik praktis atau parlemen yang dilakukan oleh politisi Islam selalu dihiraukan dan gagal.

Hal tersebut senada dengan analisis Vedi R. Hadiz mengenai “*Islamic Populism*” sebagai basis dari ideologi Islam Radikal menandakan bahwa adanya ketimpangan kelas sebagai akar dari fenomena radikalisme. Hal ini tidak hanya terjadi pada skala nasional, tetapi juga internasional. Adanya proses aktivisme transnasional menyebabkan kesadaran kelas umat Islam dapat dibangkitkan. Akibatnya, radikalisme yang pada awalnya hanya merupakan gejala di Timur Tengah, kini menjadi gejala yang ada di Indonesia. Pada titik ini, kemunculan gerakan “Islam Radikal” tidak lagi kita pahami sebagai “Talibanisasi”, “Wahabi”, atau “Islam Transnasional”, tetapi berakar dari represivisme Orde Baru yang membungkam Islam sebagai sebuah kekuatan politik. Islam Radikal hanya simbol ketidakpercayaan terhadap sebuah rezim yang otoriter dan membungkam suara rakyat (Umar, 2010: 180).

Pengeboman Candi Borobudur Tahun 1985 Persekutuan Pesantren Kilat LP3K dengan Kelompok Syi'ah Malang

Awal 1980-an gerakan oposisi Soeharto, terutama berkaitan dengan rencana penerapan asas tunggal semakin menguat. Tak hanya kelompok Islam, tapi kelompok oposisi juga datang dari tokoh-tokoh nasionalis serta para purnawirawan ABRI. Bersama dengan mereka, DI bekerjasama merencanakan sebuah revolusi di Indonesia. Mereka mengadopsi cara revolusi Iran untuk mencoba menggulingkan pemerintahan Orde Baru. Revolusi Iran secara psikologis memotivasi para aktivis muslim termasuk orang-orang DI, dan meyakinkan mereka bahwa mereka bisa melakukan revolusi serupa di Indonesia. Seperti para aktivis DI di Yogyakarta dan Solo bekerjasama dengan Mursalin Dahlan, orang DI yang juga aktivis BPMI (Badan Pembangunan Muslimin Indonesia), dan Ir. H.M. Sanusi, tokoh oposisi dari Petisi 50, Kelompok oposisi di Indonesia untuk merencanakan sebuah revolusi di Indonesia. (Solahudin, 2011: 159).

Untuk mempersiapkan rencana revolusi ini, Sanusi meminta orang-orang DI dan Mursalin Dahlan, menggiatkan pembinaan,

pencetakan kader-kader militan, yang akan memperkuat setiap poros revolusi. Meskipun Mursalin Dahlan orang DI, namun proses pengkaderan yang Ia lakukan adalah melalui BPMI. BPMI sendiri mempunyai program yang disebut pesantren kilat, sebuah kegiatan agama dalam waktu singkat (Solahudin, 2011: 170). Awalnya, kegiatan pesantren kilat hanya difokuskan pada kota-kota di Jawa Barat seperti Bandung, Cirebon, Kuningan, Tasikmalaya dan Garut. (Solahudin, 2011: 172). Program inilah yang menjadi akar atau awal adanya pereskutuan antara aktivisnya dan kelompok syi'ah di Malang.

Mulai awal 1981, BPMI kemudian melebarkan sayap hingga ke Jawa Timur. Terbukanya jaringan ke Jawa Timur ini tak lepas dari jasa Enceng Syarif yang pindah ke Malang mengikuti saudaranya Kurnia. Di sana mereka berkenalan dengan Muhammad Achwan, yang kemudian menjadi tokoh penting MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) yang juga aktivis Muhammadiyah. Enceng Syarif kemudian menawarkan kepada Muhammad Achwan untuk membuka cabang BPMI di Malang (Solahudin, 2011: 172).

Ia kemudian mencari kawan untuk bergabung dengan BPMI. Sepanjang 1981, BPMI Malang berhasil mengadakan tiga kali program pesantren kilat bertempat di Masjid Mujahidin Jalan Ir. Juanda Malang, yakni: Angkatan pertama dilaksanakan pada sekitar bulan Juli tahun 1981 peserta sebanyak 43 orang. Materi pelajaran yang diberikan adalah menanamkan rasa fanatisme terhadap Islam untuk dapat dilaksanakannya Syariat Islam, secara Kafah atau dalam segala aspek kehidupan (Putusan Pengadilan Perkara No. 45/Pid.B./1986 P.N.Mlg, 1986).

Namun aksi revolusi yang dicanangkan awal 1983 ini berakhir anti klimaks, Apel akbar yang direncanakan untuk memobilisasi umat Islam dan usaha melenyapkan Soeharto gagal dilaksanakan. Sementara DI lebih fokus melakukan perekrutan, pembinaan anggota, serta penyempurnaan ajaran, para aktifis LP3K mengambil jalan yang berbeda. Pada 1984, mereka melanjutkan agenda politik untuk

menggulingkan pemerintahan. Mereka bersekutu dengan kelompok Syi'ah di Malang yang dipimpin oleh Husein Ali Al-Habsyi dan Ibrahim Djawad (Solahudin, 2011: 184). Kelompok ini sering mengadakan pengajian yang dihadiri oleh berbagai kalangan di Malang. Pengajian ini diadakan seminggu sekali setiap Jum'at malam di Jalan Prof. Moh. Yamin Gang V/2 Malang (Putusan Pengadilan Perkara No. 1/Pts.Pid.B/1986 P.N.Mlg, 1986).

Kronologi Pengeboman Candi Borobudur

Kekacauan politik terjadi pada paruh terakhir 1984. Terjadilah Insiden Tanjung Priok dimana umat Islam yang anti-asas tunggal ditembaki tentara. Aksi ini kemudian memancing kemarahan yang luas termasuk dari kalangan Ikwanul Muslimin buatan Husein dan Ibrahim. Mereka bekerjasama untuk melakukan berbagai aksi teror sebagai aksi balas dendam. Sasaran yaitu gereja, gereja dipilih sebagai ekspresi kemarahan mereka terhadap orang Kristen yang dianggap bersekutu dengan Soeharto yang menindas umat Islam.

Keinginan untuk aksi balas dendam itu berawal setelah beberapa saat terjadinya peristiwa Tanjung Priok, pemerintah melakukan konferensi pers diwakili Pangab/Pangkopkamtib Jendral L.B. Moerdani yang menyatakan bahwa kerusuhan tersebut sudah dapat diatasi dan mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan jangan terpancing. Pada kesempatan itu L.B. Moerdani juga menyatakan bahwa akibat dari Insiden tersebut menimbulkan korban sebanyak sembilan orang tewas dan 53 lainnya luka-luka (Pangab/ Pangkopkamtib Jendral L.B. Moerdani: Kerusuhan Minta Korban di Tanjung Priok Jakarta, 14 September 1984). Pada konferensi pers tersebut terlihat upaya pemerintah khususnya aparat keamanan untuk menutupi insiden tersebut dan agar terlihat dan terkesan sebagai insiden kecil saja.

Akhirnya Husein Ali Al-Habsyi dan kawan-kawan sepakat untuk melakukan pembalasan. Aksi teror menjadi pilihan untuk aksi pengeboman. Bahan-bahan peledak mereka dapatkan asal mulanya dari perkenalan Husein Ali Al-Habsyi dengan Abdulkadir Braja. Husein

yang pada waktu itu tahu bahwa Braja berasal dari Lampung, kemudian menanyakan ketersediaan bahan peledak. Braja kemudian menginformasikan bahwa di Teluk Betung banyak bahan peledak dan Mudah didapat (Berita Acara Pemeriksaan Abdulkadir Braja, 15 Juni 1985). Husein kemudian memberitahukan kepada Mohammad Achwan bahwa Braja sanggup mencari bahan peledak atau yang diberi istilah dengan "Telur Asin" yang selama ini dicari (Berita Acara Pemeriksaan Mochamad Achwan, 28 Juni 1985).

Setelah meledakan gereja di Malang, sasaran berikutnya adalah Candi Borobudur. Alasannya karena candi yang baru dua tahun selesai dipugar pemerintah dan dijadikan monumen nasional ini dianggap sebagai lambang pemujaan alias berhala. "Dalam salah satu ceramahnya, Ibrahim pernah menyebut, pemugaran Borobudur sengaja dilakukan pemerintah untuk menandingi kemurnian Islam. Ada alasan lain yang lebih politis, yaitu sebagai peringatan kepada Soeharto dan keluarganya, karena Candi Borobudur akan dibisniskan oleh Titiek Soeharto yang sudah dapat persetujuan dari Menteri Parpostel (Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi)" (Solahudin, 2011: 189). Kalau bom gereja menggunakan kata sandi Pesta Natal, rencana peledakan Borobudur menggunakan kata sandi Camping. Ibrahim kemudian merakit sisa bahan peledak yang digunakan untuk mengebom gereja-gereja saat malam natal yang dibeli dari Basirun.

Sekitar pukul 19.00 WIB, mereka berangkat dengan bus dari lawang menuju ke Yogyakarta dengan membawa tas yang dipersiapkan (Berita Acara Pemeriksaan Achmad Muladawila, 8 Oktober 1985). Malam setelah sampai di losmen, tanggal 20 Januari sekitar pukul 19.00 WIB, Ibrahim bersama Achmad Muladawila keluar dari losmen menuju ke lokasi Candi Borobudur dengan membawa tas berisi 14 buah bom yang sudah dirakit dengan melewati kebun menuju jalan khusus untuk karyawan (Putusan Pengadilan Perkara No.1 /Pts.Pid.B/1986 P.N.Mlg, 1986). Tatkala akan memasuki lokasi candi lewat pintu selatan, lebih dulu mereka melemparkan batu ke atap pos

penjagaan. Setelah tidak ada reaksi, barulah mereka menerobos kawat berduri untuk memasuki candi (Majalah Tempo No. 48 Thn. XV, 25 Januari 1986).

Tiba diatas Candi Borobudur jam 20.00 WIB, selanjutnya Ibrahim mengeluarkan peledak dan melakukan pengetesan ulang, bahan peledak yang sudah dites oleh Ibrahim diserahkan kepada Achmad Muladawila untuk diletakan ke stupa-stupa sebanyak 12 buah. Sedangkan Ibrahim memasukan ke dalam stupa 1 buah (Putusan Pengadilan Perkara No.1/Pts.Pid.B/1986 P.N.Mlg, 1986). Lokasi yang ditaruh bom adalah di teras atas sebanyak empat buah bom, teras II sebanyak lima buah bom, dan teras III sebanyak empat buah bom (Berita Acara Lanjutan Achmad Muladawila, 10 Februari 1986). Satu buah bom macet dan ikut dibawa pulang. Total keseluruhan bom yang dipasang sebanyak 13 buah. Bom yang ditaruh di stupa-stupa Candi Borobudur itu menurut perhitungan waktu pada jam yang ditaruh pada masing-masing bom akan meledak lima jam kemudian terhitung sejak ditaruhnya bom tersebut. Perkiraan akan meledak kira-kira mulai jam 01.00 WIB (Berita Acara Pemeriksaan Achmad Muladawila, 27 September 1985).

Setelah ketigabelas bom itu dipasang, mereka langsung pergi meninggalkan Candi Borobudur. Mereka berdua jalan kaki kurang lebih sembilan kilometer ke jalan Yogy-Magelang, kemudian ikut naik colt pickup menuju Muntilan, sampai di Muntilan pindah Colt Setition menuju Magelang, dari magelang pindah Cold lagi menuju Semarang. Sampai Semarang barulah mereka naik bus menuju Surabaya (Berita Acara Pemeriksaan Achmad Muladawila, 27 September 1985). Kereka kemudian mendengar peledakan Candi Borobudur dari berita yang disiarkan di TVRI. Beberapa saat kemudian, dinamit itu memang meledak-ledak, sejak pukul 1.30 sampai 3.30 WIB beruntun berbunyi Sembilan ledakan. Pada waktu itu semua Satpam Borobudur yang minim peralatan tugasnya bingung setengah mati (Untung Masih Bisa direkonstruksi, 25 Januari 1985). Sembilan stupa ambrol, dua patung hancur, dan dua patung lainnya rusak berat.

Ledakan yang diakibatkan bom yang dipasang terdengar sampai dirasa oleh masyarakat sekitar. Hal tersebut dirasakan oleh kepala Satpam Candi Borobudur. "Rumah itu sampai bergetar kaca-kaca, pintu, jendela dan lain-lain. Saya langsung dapat laporan dari anak buah saya kalau Candi Borobudur dibom. Kemudian kami menghubungi instansi terkait" (Wawancara dengan Basjuni Supriyadi, 12 April 2018). Bom yang dipasang didalam stupa oleh Ibrahim Jawad dan Achmad Muladawila sebenarnya total ada tiga belas, namun pada saat itu yang meledak sembilan, dan dua berhasil diketemukan dan dijinakan. Baru tanggal 15 Februari diketemukan dua bom lagi.

Penanganan Pemerintah Terhadap Kasus Pengeboman Candi Borobudur

Setelah terjadinya peledakan Candi Borobudur, aparat baik dari TNI maupun kepolisian bertindak mengusut kasus pengeboman ini. Peristiwa ini menjadi PR besar bagi aparat untuk segera dituntaskan karena tidak hanya menjadi sorotan nasional saja, tetapi telah merembet ke dunia internasional. Berbagai pemberitaan dari media cetak maupun televisi ramai menjadikan peristiwa ini sebagai Headline. Aparat kemudian segera mengusut dan memeriksa para saksi untuk dimintai keterangan. "Peristiwa peledakan Candi Borobudur ini ditangani oleh Laksusda Jateng dan semuanya sudah diserahkan Pangdam VII Diponegoro. Mereka yang sudah didengar keterangannya sudah sekitar 50 orang termasuk dua penduduk wonogiri kakak beradik yang ditangkap di Surabaya juga para Satpam. Berhubung tidak ada bukti mereka semua telah dibebaskan" (Peledakan Borobudur Terus Ditangani Laksusda Jateng, 23 Januari 1985).

Hampir dua bulan proses pemeriksaan dan penyelidikan yang dilakukan aparat pasca terjadinya peledakan masih belum membawa hasil. Aparat mendapat titik terang tatkala terjadinya peristiwa kecelakaan tidak disengaja yaitu meledaknya Bus Pemudi Ekspres di Banyuwangi, yang kemudian berbuntut tertangkapnya Abdulkadir Ali Al-Habsyi. Abdulkadir menjadi kunci pertama terbongkarnya jaringan ini. Abdulkadir Ali Al-

Habsyi ditangkap ketika Bus Pemudi Ekspres yang ditumpanginya menuju Denpasar meledak di Banyuwangi. Musibah ini menewaskan tujuh orang penumpang, tiga diantaranya adalah teman Abdulkadir yang merencanakan peledakkan pada tempat-tempat masing-masing di pusat pariwisata Pantai Kuta, Bali (Kompas, 25 Maret 198).

Proses pemeriksaan Abdulkadir Ali Al-Habsyi membawa hasil aparat kemudian menangkap Achmad Muladawila pada tanggal 19 April 1985 dalam tahanan Pulaksusda 083 Malang. Kemudian per-tanggal 20 April ditahan di Rutan oleh jaksa dalam rangka penyidikan. Sedangkan Abdulkadir Braja dan Basirun Sinere ditangkap pada tanggal 5 mei 1985. Selain mereka, proses penyidikan pun dilakukan kepada tokoh-tokoh yang terlibat pada kasus tersebut. Seperti Mochamad Achwan yang lebih dulu di tangkap setelah terjadinya peledakan gereja di Malang pada akhir bulan Desember (Solahudin, 2011:189).

Achmad Muladawila dan Abdulkadir Ali Al-Habsyi kemudian dihukum 20 tahun penjara dipotong masa tahanan. Abdulkadir Braja yang awalnya dituntut dengan tuduhan mengusahakan bahan peledak, divonis 13 tahun penjara potong masa tahanan (Pelaku Peledakan Borobudur Dihukum 20 Tahun Penjara, 25 Maret 1986). Husein diganjar hukuman penjara seumur hidup, yang sebelumnya dituntut oleh jaksa dengan hukuman mati. Mereka dibina di Lembaga Permasarakatan Kelas I, Lowokwaru, Malang, Jawa Timur. "Semasa menjalani masa hukuman di lapas, Husein dan yang lainnya di perlakukan seperti narapidana pada umumnya. Mereka menjalani kehidupan sehari-hari secara normal, mereka rajin beribadah dan mengikuti program atau kegiatan yang diadakan oleh Lapas (Wawancara dengan Joko Waluyo, 22 November 2017). Mereka menjalani hukuman sampai kemudian pada pemerintahan Habibie memberikan grasi sehingga ia dapat menghirup udara bebas bersama narapidana politik lain, 23 Maret 1999 (Majalah Tempo, Edisi 6-12 April 1999). Setelah keluar dari LP tidak lama Husein dan keluarganya pindah ke daerah Jakarta (Wawancara dengan Husein Muladawila, 30

November 2017). Sedangkan Ibrahim termasuk yang bisa lolos dari penangkapan petugas. Pada keterangan beberapa pelaku, Ia berhasil lari ke luar negeri dan kembali ke Iran.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pengeboman Candi Borobudur

Radikalisme tidaklah muncul begitu saja tanpa adanya penyebab. Dalam teori sosial, radikalisme adalah sebuah gerakan yang terkait atau disebabkan oleh fakta lain. Penyebab tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Begitupun juga dalam kasus pengeboman Candi Borobudur yang dapat dilihat dalam beberapa faktor penyebabnya yaitu: (a) Faktor Politik, di beberapa belahan dunia, termasuk Indonesia sendiri fenomena radikalisme atau fundamentalisme muncul sebagai akibat otoritarianisme (Azra, 1996: 18).

Pada masa Orde Baru, Sikap otoritarianisme (dominan) yang dilakukan salah satunya yaitu kebijakan politik yang dianggap merugikan Islam dan menguntungkan elite birokrasi. Hal tersebut menimbulkan reaksi penolakan dari berbagai kalangan termasuk gerakan Islam radikal. Begitupun dalam kasus pengeboman Candi Borobudur, pengeboman tersebut merupakan bentuk protes terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru yang dianggap tidak sesuai dengan syari'at Islam. Selain itu pemerintah Orde Baru dianggap menggencet umat Islam dengan memaksakan asas tunggal Pancasila; (b) Faktor Sosial, faktor sosial dalam hal ini adalah timbulnya rasa ketidakadilan atas terjadinya peristiwa berdarah Tanjung Priok yang dialami umat Islam Tanjung Priok pada 12 September 1984. Sesuai dengan pandangan teori "identitas negatif" Jenne N. Knutson, terorisme dapat muncul dari keinginan untuk membala dendam karena perasaan marah dan tidak berdaya akibat tidak tersedianya pilihan (Djelantik, 2010: 30). Perasaan ini timbul ketika seseorang merasakan suatu ketidakadilan, penindasan, dan tindakan semena-mena terhadap diri atau kelompoknya; (c) Faktor Emosi Keagamaan dan Ideologis, Emosi

keagamaan tersebut dirasakan oleh para anggota Ikhwanul Muslimin Malang ketika mendengar adanya peristiwa Tanjung Priok dan menimbulkan banyak korban akibat tindakan represif oleh aparat keamanan. Emosi keagamaan tersebut diluapkan pada ceramah-ceramah profokatif dalam pertemuan yang dilakukan kelompok ini. (d) Faktor Ekonomi, Pada peristiwa pengeboman Candi Borobudur, faktor ekonomi juga menjadi latarbelakang walaupun faktor ini tergolong pada penyebab tersier dan hanya faktor pendorong dari sebagian pelaku saja.

Dampak Pengeboman Candi Borobudur

Peledakan Candi Borobudur yang terjadi pada tanggal 21 Januari 1985 mengakibatkan rusaknya sembilan buah stupa candi. Kesembilan stupa yang rusak tersebut semuanya mempunyai arca didalamnya. Dari Sembilan arca, dua tak dapat direkonstruksi karena hancur berkeping-keping. Namun goncangan secara beruntun akibat ledakan bom itu ternyata tidak mengakibatkan terjadinya pergeseran pondasi candi. Hal tersebut disebabkan disetiap stupa terdapat lubang-lubang cukup besar yang sedikit banyak bisa melemahkan tekanan ledakan tersebut (Candi Borobudur Normal Kembali, 23 Januari 1985).



Gambar 1. Lokasi stupa-stupa yang runtuh akibat pengeboman Candi Borobudur tahun 1985 (sumber: Arsip Balai Konservasi Borobudur)

Kerugian akibat rusaknya sembilan stupa itu tidak dapat dinilai karena Candi Borobudur merupakan sebuah warisan budaya, namun jika dilihat dari biaya perbaikan memakan biaya sekitar Rp. 16.500.000,- . Biaya tersebut diambil dari DIP Proyek Konservasi Candi Borobudur tahun anggaran 1984/1985. Sembilan stupa tersusun 2.749 blok sedang yang runtuh dan dapat dipasang kembali meliputi 372 blok (Berita Acara Pemeriksaan I.G.N. Anom, 14 September 1986). Sekitar 60-70 % dari batu candi itu hanya 25 persen yang dapat dipakai lagi. (Pelaku Peledakan Candi Borobudur Profesional: Sembilan Bom Meledak, 22 Januari 1985). Setelah dicek kembali, perbaikan stupa-stupa Candi Borobudur itu dapat diselesaikan hanya dalam waktu tiga bulan. Jadi berbeda dengan rencana semula yang akan diperkirakan memakan waktu 5-6 bulan (Candi Borobudur Normal Kembali, 23 Januari 1985).



Gambar 2. Bagian-Bagian stupa Candi Borobudur yang runtuh berserakan akibat ledakan bom (sumber: store.tempo.co)

Selain kerusakan fisik, peledakan Candi Borobudur juga berdampak pada beberapa bidang, antara lain: Pertama, Peningkatan Sistem Keamanan Candi Borobudur. Pasca peristiwa peledakan, berdampak pada peningkatan sistem pengamanan. Hal tersebut untuk menghindari terulangnya kembali gangguan ataupun bahaya lainnya yang dapat menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi candi. Upaya peningkatan keamanan tersebut dibagi menjadi dua yaitu peningkatan perangkat lunak dan perangkat keras. "Peningkatan perangkat lunak meliputi pembinaan personil, penyempurnaan cara kerja , dan peningkatan koordinasi kerja dengan aparat

keamanan teritorial lainnya. Mengingat sebelum pengeboman Candi Borobudur dari 80 Satpam Proyek Konservasi Candi Borobudur baru terdapat 26 orang tenaga Satpam yang telah dilatih di tingkat Pusdiklat Jakarta selama tiga bulan" (Laporan Khusus Hasil Perbaikan Kembali 9 Stupa Candi Borobudur, 1985: 32).

Selain itu, setelah terjadinya peledakan, untuk memasuki pintu masuk, pengunjung mendapatkan pengawasan yang ketat. Tidak ada yang diperbolehkan membawa tas. Di pintu masuk disediakan penitipan tas, begitupun juga bus-bus wisatawan yang parkir, baik domestik maupun asing diperiksa dengan ketat (Candi Borobudur Normal Kembali, 23 Januari 1985). Saat pengamanan Satpam Candi Borobudur diberikan fasilitas peralatan yang lebih canggih daripada sebelumnya. Hal tersebut dilakukan untuk menunjang keamanan candi. Fasilitas tersebut seperti pemasangan alat komunikasi HT Stasioner, dan perlengkapan alat lain seperti, lampu baterai, pentungan, dan borgol (Laporan Khusus Hasil Perbaikan Kembali 9 Stupa Candi Borobudur, 1985: 35).

Kedua, Berdampak Terhadap Kepariwisataan Candi Borobudur. Peristiwa hancurnya sembilan stupa di Candi Borobudur yang menggegerkan dunia internasional, tidak saja ditanggapi dalam kaitan sistem pengamannya saja, tetapi lebih banyak dikaitan ke sektor business kepariwisataan. Berdasarkan berbagai pemberitaan, terdapat dampak positif dan negatifnya. Berbagai kalangan pun memberikan tanggapan mengenai pengaruh peristiwa peledakan tersebut terhadap sektor ekonomi pariwisata Indonesia.

Kekawatiran muncul dari beberapa kalangan yang berkecimpung dalam usaha kepariwisataan berpendapat sebaliknya. Sekjen Asita (Asosiasi Biro Perjalanan Indonesia), Tjok Rorimpandey menyebutkan, aksi teror tersebut tentu berpengaruh negatif pada arus wisatawan ke Borobudur. Wisnu Wardana, sekertaris Himpunan Penulis Pariwisata (HPP) Bali menyebutkan, peristiwa Borobudur tentu menimbulkan dampak negatif bagi usaha kepariwisataan Indonesia. Karena masalah keamanan merupakan suatu syarat penting untuk

meningkatkan arus wisatawan (Pengaruh Peledakan Candi Borobudur Terhadap Usaha Kepariwisataan Kita, 27 Januari 1985).

Faktanya sehari setelah terjadinya peledakan bom yang menghancurkan Sembilan stupa itu suasannya kembali normal. "Sekitar 3.000 pengunjung terutama yang berdatangan dari luar kota tampak memadati karena candi kebanggaan nasional itu untuk melihat dari dekat reruntuhan bekas peledakan tersebut" (Candi Borobudur Normal Kembali, 23 Januari 1985). Jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia pada tahun 1984-1986 mengalami kenaikan dan kenaikan tersebut stabil setiap tahunnya. Jumlah Wisman pada tahun 1985 tepat terjadinya peristiwa pengeboman, sebanyak 749.351 wisman, atau naik 48.441 wisman dari tahun sebelumnya (Badan Pusat Statistik, 1974-1990). Begitupun tahun-tahun setelahnya yang cenderung stabil kenaikannya. Oleh karena itu, peristiwa Pengeboman Candi Borobudur tidak signifikan berdampak negatif bagi industri pariwisata Indonesia.

Ketiga, Dampak Sosial. Aksi peledakan yang terjadi di Candi Borobudur berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakatnya. Pengaruh tersebut dianataranya adalah rasa takut (tidak aman) yang dirasakan oleh masyarakat sekitar dan karyawan di tempat wisata Candi Borobudur. Selain rasa takut tersebut, penanganan yang dilakukan aparat pun menimbulkan dampak di masyarakat. Mulai dari tindakan represif saat penyidikan dan pemeriksaan bahkan sampai salah penangkapan. Adanya peristiwa peledakan tersebut juga menimbulkan sikap saling curiga antar masyarakat (konflik horizontal). Sikap tersebut timbul karena belum adanya titik terang siapa pelaku pengeboman tersebut. Kecurigaan juga ditujukan kepada orang-orang yang menentang/tidak setuju pada waktu pembebasan lahan untuk pembuatan taman wisata candi borobudur. Namun setelah pemeriksaanpun mereka dinyatakan tidak terlibat. Kecurigaan tersebut juga di tujukan kepada jaringan Islam radikal yang berada di Ngruki. Kecurigaan tersebut karena kelompok tersebut terdekat dengan Candi Borobudur dan sering melakukan aksi. Jaringan

yang dimaksud adalah Darul Islam yang berada di Solo.

Keempat, Dampak politik. Dampak politik, baik didalam negeri maupun luar negeri langsung dirasakan setelah peristiwa peledakan Candi Borobudur. Banyak sekali politikus-politikus nasional yang angkat bicara setelah terjadinya peledakan. Secara resmi Presiden Soeharto mengemukakan, peledakan Candi Borobudur yang terjadi baru-baru ini dilakukan oleh orang-orang yang didorong oleh fanatisme suatu golongan dan tidak mempunyai kebanggaan nasional (Presiden Kepada Menteri Pendidikan Thailand: Peledakan di Candi Borobudur Dilakukan Orang-Orang yang Didorong oleh Fanatisme Suatu Golongan, 24 Januari 1985).

Ledakan tersebut juga mendapat simpati internasional yang didengar oleh beberapa pejabat luar negeri. Buktinya beberapa anggota parlemen Prancis dan Presiden SEAMEC segera mengunjungi Borobudur (Borobudur akan Dijaga Anjing Pelacak, 23 Januari 1985). Rombongan Parlemen Prancis itu juga meninjau stupa-stupa yang hancur, dan mereka merasa lega dan kagum karena sebentar saja sudah berdiri lagi. Direktur Jendral UNESCO, Amadoo Mohtar M'bow secara resmi juga telah menawarkan bantuan badan dunia itu untuk memperbaiki Candi Borobudur yang rusak akibat peledakan bom (UNESCO Tawarkan Bantuan Perbaiki Candi Borobudur, 23 Januari 1985). Namun tawaran tersebut ditolak pihak pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri merasa sanggup baik materil maupun non materil untuk memperbaiki Candi Borobudur yang rusak (UNESCO yang Sangat Simpatik, 24 Januari 1985).

Sedangkan pasca pengeboman Candi Borobudur dan gagalnya aksi peledakan di Bali, dampak politik yang dialami gerakan Islam radikal di Indonesia berbuntut aksi penciduk terhadap orang-orang yang dianggap punya kaitan dengan berbagai kasus pengeboman. "Selain kelompok Syi'ah di Malang, Mursalin Dahlan, Muhammad Achwan, Ir. Sanusi serta Ir. Syahrul Alim adalah sebagian orang yang ikut ditangkap. Belakangan tentara juga memburu

Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir yang kabur" (Solahudin, 2011:192). Sedangkan pemerintah tetap mengundangkan RUU tentang Parpol dan Golkar serta RUU tentang Ormas kedalam UU No.5/1985 dan UU No.8/1985. Hadirnya UU tersebut sebagai bentuk upaya pemerintah untuk pembatasan ruang dan gerak Ormas-ormas radikal yang ada di Indonesia.

SIMPULAN

Pengeboman Candi Borobudur terjadi pada tanggal 21 Januari 1985 yang dilakukan oleh persekutuan Pesantren Kilat LP3K dengan Kelompok Syi'ah di Malang. Mereka membuat sebuah organisasi bernama Ikhwanul Muslimin dan melakukan pengeboman gereja di Malang, Candi Borobudur, dan merencanakan pengeboman di Bali. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa tersebut, yakni faktor politik, yaitu mereka menentang sikap otoritarianisme pemerintah yang dianggap membuat kebijakan merugikan umat Islam dan menguntungkan elite birokrasi. Salah satunya adalah penerapan asas tunggal Pancasila.

Aksi Pengeboman tersebut juga dipicu dari faktor sosial, yaitu timbulnya rasa ketidakadilan atas terjadinya peristiwa berdarah Tanjung Priok yang dialami umat Islam pada 12 September 1984. Hal tersebut kemudian di tambah dengan faktor solidaritas keagamaan dan keinginan melakukan revolusi seperti di Iran dengan cara balas dendam melakukan aksi-aksi pengeboman. Proses Penyidikan kasus ini memakan waktu dua bulan. Hingga aparat mendapat titik terang ketika terjadinya peristiwa kecelakaan tidak disengaja yaitu meledaknya Bus Pemudi Ekspres di Banyuwangi tanggal 16 Maret 1985. Adanya peristiwa tersebut berujung pada penangkapan para pelaku. Mereka diadili di Pengadilan Negeri Malang, Jawa Timur dan dianggap melanggar undang-undang Nomor 11/PNPS/1963, yang biasa disebut Undang-Undang Subversi. Achmad Muladawila dan Abdulkadir Ali Al-Habsyi kemudian dihukum 20 tahun. Abdulkadir Braja yang awalnya dituntut dengan tuduhan mengusahakan bahan peledak, divonis 13 tahun penjara. Basirun Sinere yang berperan sebagai

pencari dan penjual bahan peledak di hukum delapan tahun penjara. Sedangkan Mochamad Achwan sebagai pendiri LP3K dan sebagai utusan Husein Ali Al-Habsyi untuk menemui Braja dan Basirun dihukum seumur hidup. Husein sendiri diganjar hukuman penjara seumur hidup, yang sebelumnya dituntut oleh jaksa dengan hukuman mati.

Peristiwa pengeboman Candi Borobudur ini menimbulkan berbagai dampak yang dirasakan. Dampak pertama, yaitu peledakan tersebut mengakibatkan rusaknya sembilan buah stupa candi dan dua arca di dalamnya hancur. Dampak lain yaitu meningkatnya sistem keamanan candi, baik melalui peningkatan kemampuan (pembinaan) personil keamanan maupun penyempurnaan sarana dan prasarana keamanan candi. Pada bidang pariwisata, peristiwa ini ternyata mengakibatkan melonjaknya jumlah wisatawan Candi Borobudur dari hari biasanya dikarenakan banyak wisatawan yang penasaran dan ingin menyaksikan langsung keadaan candi tersebut. Sedangkan dampak Sosial yang dialami masyarakat sekitar yaitu kekhawatiran peristiwa yang sama terjadi lagi bahkan ditakutkan menimbulkan korban jiwa, proses penyidikan yang represif dilakukan aparat juga ngengakibatkan dampak psikis para saksi. Adanya peristiwa peledakan tersebut juga menimbulkan sikap saling curiga antar masyarakat. Sedangkan dampak politik dari peristiwa tersebut adalah banyak sekali reaksi simpati dari politikus nasional maupun internasional. Sedangkan dampak politik yang dialami gerakan Islam radikal di Indonesia setelah peristiwa itu, berbuntut pada aksi penciduk terhadap orang-orang yang dianggap punya kaitan dengan berbagai kasus pengeboman dan dipersempitnya ruang gerak Islam radikal untuk berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip Pengadilan dan Kejaksaan

Pengadilan Negeri Malang, Putusan Pengadilan Perkara No. 45/Pid.B./1986 P.N.Mlg, terdakwa Mochamad Achwan.

Pengadilan Negeri Malang, Putusan Pengadilan Perkara No. 1/Pts.Pid.B/1986 P.N.Mlg, terdakwa Achmad Muladawila.

Kejaksaan Negeri Malang, Berita Acara Pemeriksaan "Abdulkadir Braja", tanggal 15 Juni 1985.

Kejaksaan Negeri Malang, Berita Acara Pemeriksaan "Mochamad Achwan" , tanggal 28 Juni 1985.

Kejaksaan Negeri Malang, Berita Acara Pemeriksaan "Achmad Muladawila", tanggal 8 Oktober 1985.

Kejaksaan Negeri Malang, Berita Acara Pemeriksaan "Achmad Muladawila", tanggal 27 September 1985.

Pengadilan Negeri Malang, Berita Acara Lanjutan "Achamad Muladawila" dalam persidangan Achmad Muladawila, tanggal 10 Februari 1986.

Kejaksaan Negeri Mungkid, Berita Acara Pemeriksaan "I. Gusti Ngurah Anom", tanggal 14 September 1986.

Balai Konservasi Borobudur, Arsip Laporan Khusus Hasil Perbaikan Kembali 9 Stupa Candi Borobudur dan Peningkatan Sistem Pengamanannya, tahun 1985.

Arsip Surat Kabar

Borobudur akan Dijaga Anjing Pelacak, Jawa Pos tanggal 23 Januari 1985.

Pangab/ Pangkopkamtib Jendral L.B. Moerdani: Kerusuhan Minta Korban di Tanjung Priok Jakarta, Suara Merdeka, 14 september 1984.

Pelaku Peledakan Borobudur Dihukum 20 Tahun Penjara, Koran Kompas, tanggal 25 Maret 1986.

Pelaku Peledakan Candi Borobudur Profesional: Sembilan Bom Meledak, Jawa Pos, tanggal 22 Januari 1985.

Peledakan Borobudur Terus Ditangani Laksusda Jateng, Sinar Harapan, tanggal 23 Januari 1985.

Pengaruh Peledakan Candi Borobudur Terhadap Usaha Kepariwisataan Kita, Sinar Harapan, tanggal 27 Januari 1985.

Untung Masih Bisa direkonstruksi, Koran Kompas, tanggal 25 Januari 1985.

Candi Borobudur Normal Kembali, Suara Merdeka, tanggal 23 Januari 1985.

UNESCO yang Sangat Simpatik, Suara Merdeka tanggal 24 Januari 1985.

UNESCO Tawarkan Bantuan Perbaiki Candi Borobudur, Suara Merdeka, tanggal 23 Januari 1985.

Presiden Kepada Menteri Pendidikan Thailand: Peledakan di Candi Borobudur Dilakukan Orang-Orang yang Didorong oleh Fanatisme Suatu Golongan, Suara Merdeka, tanggal 24 Januari 1985.

Arsip Majalah

Majalah Tempo, No. 48 Thn. XV, Tanggal 25 Januari 1986.

Majalah Tempo, Edisi 6-12 April 1999.

Buku

Anwar, M. Syafi'i. 1995. *Pemikiran dan Aksi Islam Politik "Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*. Jakarta: Paramadina.

Azra, Azyumardi. 1996. *Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalis, Modernisme hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Paramadina.

Djelantik, Sukarwasini. 2010. *Terrorisme: Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*. Jakarta: Yayasan Obor.

Fatwa, A.M. 2005. *Pengadilan HAM Ad Hoc Tanjung Priok: Pengungkapan Kebenaran untuk Rekonsiliasi Nasional*. Jakarta: Darmapena.

Feiliard, Andree. 2008. *NU Vis- a-Vis Negara*. Yogyakarta: LKIS.

Gottschalk, Louis. 1985. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan oleh Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press.

Ismail, Faisal. 1999. *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Karim, M. Rusli. 1999. *Negara dan Pemimpinan Islam Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Mubarak, M Zaki. 2008 *Genealogi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokras*. Jakarta: LP3ES.

Nugroho, Taufiq. 2003. *Pasang Surut Hubungan Islam Dan Negara Pancasila*. Yogyakarta: Padma.

Sodiq, Ibnu. 2010. *Bom J.W. Marriot*. Semarang: Widya Karya.

Solahudin. 2011. *NII Sampai JII Salafy Jihadisme di Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.

Tim LIPI. 2001. *Militer & Politik Kekerasan Orde Baru Soeharto di Belakang Peristiwa 27 Juli*. Jakarta: Mizan.

Jurnal

Simorangkir, Jungjungan, Terorisme: Antara Aksi dan Reaksi. *Jurnal Religia*, Istinbath/ No.16/ Th.XIV/ Juni 2015.

Umar, Ahmad Rizky Mardhatillah. Melacak Akar Radikalisme di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JSP)*, Universitas Gajah Mada, Volume 14 No.2, 2010.

Sumber Wawancara

Basjuni Supriyadi, tanggal 12 April 2018, di Kabupaten Magelang.

Husein Muladawila, tanggal 30 November 2017 di

Malang.

Djoko Waluyo, tanggal 22 November 2017 di Malang.